PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU KIAI DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL

MUHIBBIN

Pembimbing : Drs. Priyatmoko., M.A.

SOCIAL, CHANGE ; ISLAM AND POLITICS

KKB KK-2 TS 04 / 09 Muh p

Copyright : @ 2008 by Airlangga University Library

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil daerah penelitian di kecamatan Ujung Pangkah, sebuah kecamatan di ujung utara kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensip tentang pemahaman masyarakat terhadap perilaku kiai dalam dinamika politik.

Penelitian ini mengangkat masalah tentang 1) makna kiai yang berpolitik bagi masyarakat; 2) pemahaman masyarakat terhadap fragmentasi pilihan politik di kalangan kiai, dan 3) fator-faktor yang mendasari perubahan atau pergeseran pemahaman masyarakat terhadap kiai yang berpolitik.

Perspektif utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konstruksi sosial, selain teori pilihan rasional dan teori tindakan sosial Weber sebagai *supporting theory*. Sebagai salah satu pendekatan dalam ilmu sosial, konstruksi sosial mengarahkan pada pentingnya pembacaan pemahaman realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penelusuran informasi pada subjek dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang dipikirkan, diketahui, dan dibayangkan oleh subjek penelitian. Melalui strategi tersebut, informasi akan didapatkan secara memadai melalui elaborasi pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dengan subjek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa *Pertama*, makna kiai berpolitik bagi masyarakat memunculkan dua varian. 1) Sebagian (kecil) mereka setuju dengan keterlibatan kiai di politik dengan alasan kiai memiliki legitimasi politik untuk menegakkan paham *ahlussunnah wal jama'ah*, sebagaimana yang menjadi pedoman warga *nahdliyin*, sehingga akan lebih memudahkan para kiai untuk melaksanakan tugas utamanya sebagai pemimpin umat dan pengasuh pesantren. 2) Sebagian (besar) mereka tidak setuju dengan alasan akan menggangu tugas utamanya.

Dua varian makna kiai berpolitik bagi masyarakat, secara umum memiliki implikasi tersendiri terhadap 1) degradasi ketokohan kiai sebagai akibat dari semakin merosotnya kharisma yang dimiliki serta otoritas keagamaannya semakin terkikis; 2) perannya sebagai benteng moralitas umat menjadi taruhan. Sebab bagaimanapun, ketika kiai bersentuhan dengan politik, berarti sedang "bermain-main" dengan kekuasaan.

Hal yang demikian, politik akan cenderung hanya dijadikan sebagai media untuk meraih kekuasaan, dan predikat menjadi teladan umat (*al-uswah al-hasanah*) tentu saja akan tercerabut dari legitimasi sosial masyarakat.

Kedua, fragmentasi pilihan politik kiai dipahami oleh masyarakat dalam dua bentuk. 1) Terjadi segmentasi kepemimpinan kiai, terutama kepemimpinan politik kiai di masyarakat. Kekuasaan politik tidak lagi terpusat pada satu kiai, melainkan terdistribusi ke seluruh kiai yang terlibat dengan politik. Akibatnya, ketika berpihak pada salah satu kekuatan politik kiai dinilai tidak lagi netral. 2) Sebagai akibat langsung dari yang pertama, masyarakat menjadi terpolarisasi. Perpecahan di kalangat umat-pun kadang tidak bisa dihindari karena para kiai sendiri sibuk dengan kepentingan politiknya, sementara urusan umat menjadi terkesampingkan. Bahkan fragmentasi politik di akar rumput cenderung semakin menguat ketika kepentingan-kepentingan politik dibumbui teks-teks agama sebagai pembenar. Meski demikian, kiai yang mengalami fragmentasi pilihan politik, bukan berarti ketaatan mereka terhadap kiai mengenai masalah keagamaan menjadi hilang sama sekali. Semua kiai, menurut pandangan mereka, sangat dihormati. Meskipun harus dicatat bahwa penghormatan itu semata-mata karena posisi kiai sebagai tokoh agama yang memimpin pesantren.

Ketiga, keterlibatan kiai di politik melahirkan pergeseran pemahaman di kalangan masyarakat (Ujung Pangkah). Perubahan ini disebabkan karena beberapa faktor. 1) Faktor konsistensi (*istiqamah*) kiai. Fenomenanya, kiai sering --untuk mengatakan selalu-- berhijrah dari satu partai politik ke partai politik yang lain. Kesan ini menjadikan kredibilitasnya dipertanyakan. 2) Akibat dari hal tersebut, kiai tidak memiliki keberpihakan kepada umat, justru yang terjadi adalah kiai cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. 3) Karena rasionalitas pemilih. Dalam menentukan pilihan politik, masyarakat tidak semata-mata melihat figur kiai, melainkan pada aspek visi dan misi serta program yang ditawarkan, baik oleh partai politik maupun seorang calon.